

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada Sebelum Dan Setelah Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata persentase rasio sebelum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2015-2017 :

- a. Analisis varians pendapatan daerah sebesar (Rp17.337.428.610,53) Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang kurang baik.
- b. Rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 6,2% dikategorikan rendah sekali Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang tidak baik.
- c. Rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 83,74% dikategorikan sangat tinggi pemerintah daerah dinilai memiliki kinerja yang tidak baik.
- d. Rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 7,6% dikategorikan rendah sekali Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang tidak baik.
- e. Rasio efektivitas PAD sebesar 104,87% dikategorikan sangat efektif Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang baik.
- f. Rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 95,95% dikategorikan cukup efisien pemerintah daerah dinilai memiliki kinerja yang cukup baik.
- g. Rasio efektivitas pajak daerah sebesar 115,06% dikategorikan sangat efektif Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang baik.

- h. Rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 12,83% Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang baik karena mengalami pertumbuhan positif.
- i. Rasio varians belanja sebesar (Rp71.307.704.681,53) Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang baik.
- j. Rasio pertumbuhan belanja sebesar 10,36% Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang baik karena mengalami pertumbuhan positif.
- k. Rasio keserasian belanja modal sebesar 30,53% dikategorikan kurang serasi Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang kurang baik.
- l. Rasio keserasian belanja operasi sebesar 56,06% dikategorikan serasi Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang baik.
- m. Rasio keserasian belanja langsung dan tidak langsung sebesar 49,26% dan 50,74% dikategorikan cukup serasi Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang cukup baik.
- n. Rasio efisiensi belanja sebesar 88,84% dikategorikan sangat efisien Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang baik.
- o. Analisis siLPA tahun lalu sebesar Rp62.245.196.309,57 Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang baik.
- p. Rasio pertumbuhan siLPA sebesar -37,42% Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang tidak baik karena memiliki pertumbuhan negatif.
- q. Rasio proporsi penerimaan siLPA sebesar 99,99%, penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar 0,01 pemerintah daerah dinilai memiliki kinerja yang kurang baik karena memiliki penerimaan terbesar hanya bersumber dari siLPA.

- r. Kinerja Pemerintah Daerah dinilai kurang baik karena pengeluaran pembiayaan hanya terjadi pada tahun 2016 yaitu item pemberian pinjaman daerah .

2. Rata-rata persentase rasio setelah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2018 sampai 2020 :

- a. Analisis varians pendapatan daerah sebesar (Rp19.909.333.229,21) Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang kurang baik.
- b. Rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 6,9% dikategorikan rendah sekali Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang tidak baik.
- c. Rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 85,99% dikategorikan sangat tinggi Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang tidak baik.
- d. Rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 8,06% dikategorikan rendah sekali Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang tidak baik.
- e. Rasio efektivitas PAD sebesar 84,21% dikategorikan kurang efektif Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang kurang baik.
- f. Rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 91,64% dikategorikan cukup efisien Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang cukup baik.
- g. Rasio efektivitas pajak daerah sebesar 100,24% dikategorikan sangat efektif Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang sangat baik.
- h. Rasio pertumbuhan pendapatan sebesar -2,18% Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang tidak baik karena mengalami pertumbuhan negatif.

- a. Rasio varians belanja sebesar (Rp88.080.867.027,57) Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang baik karena telah melakukan penghematan anggaran.
- b. Rasio pertumbuhan belanja sebesar -3,29% Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang tidak baik karena mengalami pertumbuhan negatif.
- c. Rasio keserasian belanja modal sebesar 21,44% dikategorikan tidak serasi Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang tidak baik.
- d. Rasio keserasian belanja operasi sebesar 69,52% dikategorikan serasi Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang baik.
- e. Rasio keserasian belanja langsung dan tidak langsung sebesar 41,75% dan 58,25% dikategorikan kurang serasi Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang kurang baik.
- f. Rasio efisiensi belanja sebesar 89,08% dikategorikan sangat efisien Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang baik.
- g. Analisis siLPA tahun lalu sebesar Rp68.903.247.777,68 Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang baik.
- h. Rasio pertumbuhan siLPA sebesar 27,03% Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang baik karena memiliki pertumbuhan positif.
- i. Rasio proporsi penerimaan siLPA sebesar 93,26%, penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar 2,21% dan pencairan dana cadangan sebesar 4,53% Pemerintah Daerah dinilai memiliki kinerja yang kurang baik karena memiliki penerimaan terbesar hanya bersumber dari siLPA.

- j. Kinerja Pemerintah Daerah dinilai tidak baik karena tidak melakukan pengeluaran pembiayaan selama 3 tahun.

6.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Ngada harus menyusun strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi, agar tingkat ketergantungan terhadap pendapatan transfer semakin rendah dan tingkat kemandirian, penyelenggaraan desentralisasi serta pertumbuhan pendapatan semakin meningkat.
2. Pemerintah Kabupaten Ngada harus menyusun rencana yang baik dan terkendali agar pertumbuhan belanja selalu cenderung naik dan stabil.
3. Pemerintah Kabupaten Ngada harus meningkatkan belanja modal dan belanja langsung agar kualitas *output* semakin baik.
4. Pemerintah Kabupaten Ngada harus meningkatkan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan untuk membantu mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah.
5. Pemerintah Kabupaten Ngada harus memperbaiki aspek kelembagaan/pengelolaan pendapatan asli daerah, peningkatan jumlah wajib pajak, penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan kebijakan di bidang investasi, melibatkan pihak swasta dengan stimulan yang menarik untuk menanamkan investasinya ke daerah dan menarik investor dengan didukung oleh birokrasi yang mudah dan infrastruktur yang mendukung, menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif.